



Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia

Oleh

Mohammad Hasan Ansori

Direktur Program dan Riset di The Habibie Center
ansori@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang dilanda oleh kecemasan dan kekacauan yang luar biasa disebabkan oleh munculnya bencana besar, yaitu wabah virus COVID-19. Lebih dari 200 negara diperkirakan telah terjangkit virus ini. Sebagai sebuah sistem, globalisasi saat ini telah membuat dunia menjadi "*small village*", di mana semua bagiannya menjadi saling terkoneksi tanpa batas (*borderless*) yang membuat transportasi dan pergerakan barang dan manusia antar negara dan benua menjadi lebih mudah dan cepat.¹ Globalisasi telah berperan penting dalam memfasilitasi status pandemi virus COVID-19 saat ini. Selain itu, faktor strategis lainnya secara khusus merujuk pada kemajuan teknologi transportasi yang membantu kemudahan dan kecepatan mobilitas manusia antar negara dan benua.² Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia sebuah virus yang menyebar begitu cepat dan agresif ke hampir seluruh belahan dunia hanya dalam waktu kurang lebih empat bulan sejak kemunculannya pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir November 2019.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar oleh virus COVID-19. Sejak pertama kali virus tersebut terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, angka kasus wabah virus menunjukkan bahwa paling tidak sampai saat ini, peningkatan terlihat cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari. Kurva angka kasus COVID-19 pun sama sekali belum menunjukkan kecenderungan menurun. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memprediksi angka kasus COVID-19 di Indonesia akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Kemampuan, kecepatan, dan efektivitas respons pemerintah Indonesia yang buruk dan lambat serta pengambilan keputusan yang dinilai penuh dengan keragu-raguan dianggap bertanggung jawab dalam tingginya angka kasus tersebut.



Analisa Kelas Sosial

Setiap bencana, termasuk bencana wabah virus COVID-19 ini, memberikan kesempatan untuk dikaji dari berbagai aspek dan disiplin keilmuan serta menawarkan solusi kebijakan alternatif yang dapat saling melengkapi dan memperkuat untuk penanganan wabah virus tersebut di Indonesia. Dalam ranah ilmu sosial, berbagai aspek proses dan struktur sosial serta organisasi sosial dapat menjadi kajian dan opsi kebijakan tersendiri. Max Weber, salah satu pendiri ilmu sosial yang telah memberikan landasan kuat atau kerangka analisis menarik untuk melihat bencana wabah virus COVID-19 dari aspek ketidakseimbangan struktural (*structured inequalities*) terkait kelas, status, dan kekuasaan.³

Liechty (2003) menegaskan bahwa analisis kelas terhadap fenomena sosial selalu jatuh pada salah satu pendekatan, yaitu antara struktural-deterministik (*given*) atau kultural-konstruktivis (*processual*). Weber sendiri telah memberikan kerangka analisis kelas yang banyak dijadikan referensi saat ini, dengan membagi kelas menjadi tiga bagian yaitu bawah (*lower class*), menengah (*middle class*), dan atas (*upper class*) yang digambarkan secara proporsional dalam bentuk kurva segitiga.⁴ Kategorisasi kelas secara struktural pada umumnya merujuk pada basis perbedaan kekayaan atau pendapatan personal.⁵ Sebagaimana ciri khas negara berkembang, struktur sosial-ekonomi penduduk Indonesia masih didominasi oleh kelas bawah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 60 juta orang pada tahun 2019 dan dapat meningkat menjadi 85 juta orang pada tahun ini.⁶ Secara teoritis, jika merujuk pada kurva segitiga kelas sosial, jumlah kelas bawah bisa jadi hampir dua kali lipat dari angka tersebut. Bahkan menurut Bank Dunia (2020), komposisi dan proporsi kelas di Indonesia terdiri dari kelas bawah (79%), kelas menengah (20%) dan kelas atas (kurang dari 1%).⁷

Virus COVID-19 dapat menyerang siapapun tanpa mempedulikan batas kelas sosial, suku, dan agama, namun masyarakat kelas bawah merupakan kelompok yang paling rentan dan beresiko. Cepat atau lambat, jika tidak ditangani dengan tepat dan efisien, virus ini akan menyasar secara masif masyarakat kelas bawah Indonesia yang merupakan mayoritas. Masyarakat kelas bawah lebih rentan karena tidak memiliki ketahanan sosial yang lebih baik. Masyarakat kelas bawah juga yang akan merasakan dampak terbesar ditambah jumlahnya yang dominan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi berkepanjangan jika merujuk pada masa trauma pasca bencana (*post-disaster trauma*). Akan tetapi, sejauh ini belum ada data-data yang menggambarkan variabel sosial-ekonomi para pasien yang terpapar virus COVID-19. Data resmi terkait DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling banyak memiliki kasus positif COVID-19, dengan persentase sekitar 50% lebih banyak dari jumlah kasus di provinsi lainnya,





THC INSIGHTS

No. 14 / 06 April 2020
www.habibiecenter.or.id

hanya menggambarkan variabel gender dan usia para pasien.⁸ Pemerintah perlu mengetahui data ini untuk mengidentifikasi bantuan apa yang dapat didistribusikan dan kepada siapa bantuan tersebut diberikan untuk mengurangi beban ekonomi kelas-kelas tertentu dalam situasi pandemi ini.

Selain itu, kebijakan mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia yang berupa kebijakan karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan pembatasan pergerakan masyarakat secara ketat dan himbauan untuk tidak keluar rumah dan bekerja dari rumah (*work from home*) kecuali untuk keperluan esensial seperti ekonomi, telah memukul dan berdampak secara masif terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah, terutama pekerja di sektor informal dan/atau pekerja harian. Dalam hal ini, tidak keluar rumah (*stay home*) dapat memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda untuk setiap kelas. Bagi masyarakat kelas bawah, tidak keluar rumah dapat berarti tidak bisa makan pada hari tersebut.

Simpulan

Pemerintah harus secara cepat dan tanggap memberikan prioritas kebijakan ketahanan pangan untuk masyarakat kelas bawah. Alokasi anggaran khusus diperlukan untuk perlindungan kehidupan masyarakat kelas bawah. Termasuk kebijakan untuk memberikan bantuan makanan, keringanan berbagai pengeluaran rumah tangga, khususnya tarif listrik dan air, akses kesehatan yang lebih mudah, hingga mempertahankan pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Jika tidak dilakukan secepatnya, dalam hitungan hari, akan banyak di antara masyarakat kelas bawah yang jatuh pada kemiskinan ekstrem.





Endnotes

- 1 Mohammad Hasan Ansori, "Consumerism and the emergence of new middle class in globalizing Indonesia", *Exploration: Journal of Southeast Asian Studies*, The University of Hawaii, vol. 9, spring 2009. Diakses dari <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/10713/1/UHM.Explorations.2009.v9.Ansori.Indonesia-Middleclass.pdf>
- 2 Quarantelli, 1998
- 3 See Robert A Stalling, *Weberian political sociology and sociological disaster studies*, "Sociological forum", vol. 17, no. 2, Juni 2002. Lihat juga Henry W. Sischer III, *The sociology of disaster: definitions, research questions, and measurements in post –September 11, 2000, environment.*. Paper submitted for presentation at the annual meetings of the American Sociological Association, Atlanta, August 2003
- 4 *Ibid.*
- 5 <https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5c5e71beaeebe15a9b24ad14/masyarakat-kelas-menengah-dalam-kisaran-ekonomi?page=all>
- 6 <https://katadata.co.id/berita/2019/01/23/85-juta-penduduk-kelas-menengah-di-2020-peluang-bagi-industri-kreatif>
- 7 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/masyarakat-menuju-kelas-menengah-kelompok-terbesar-penduduk-indonesia>
- 8 Lihat <https://corona.jakarta.go.id/id/data>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id